ANALISIS KRIMINALOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIANRESOR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ZALWI AFRIDHO

NPM : 161010408

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Zalwi Afridho

NPM : 161010408

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13-09-1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL D0AB9AKX015116968

ZALWI AFRIDHO

Scanned by TapScanner



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM R

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Zalwi Afridho

161010408

No. Reg : 1340/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1882582593/30 %

Dengan Judul :

Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Delvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Scanned by TapScanner

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

F.A.3.10

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 161010409
Nama Mahasiswa : ZALWI AFRIDHO
Dosen Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H, M.H
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : ANALISI KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : *CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TRAFFIC VIOLATIONS BY CHILD WHO DOESN'T HAVE A DRIVING LICENSE (SIM) IN THE JURISDICTION OF PEKANBARU RESORT POLICE*
Lembar Ke : 1 (SATU)

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	21/06/2022	Perbaikan	Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka	
2	27/06/2022	Perbaikan	Metode Penelitian, Konsep Operasional, BAB II Tinjauan Umum, BAB III Hasil Penelitian	
3	05/07/2022	Perbaikan	Abstrak, Daftar Isi, Latar Belakang Masalah, Konsep Operasional, Daftar Pustaka	
4	12/07/2022	Perbaikan	Kata Pengantar, Metode Penelitian, BAB II Tinjauan Umum, BAB III Hasil Penelitian, dan Pembahasan	
5	19/07/2022	Koreksi	Kesimpulan dan Wawancara	
6	25/07/2022	Koreksi	Cover Penulisan Judul, Metode Penelitian, Penulisan, Pengutipan, Hasil Wawancara, Daftar Pustaka	
7	28/07/2022	Koreksi	BAB III Hasil Penelitian, BAB IV Kesimpulan Dan Saran, Penutup	
8	05/08/2022	ACC	ACC dan Dapat Dijanutkan Untuk Ujian Komprehensip	

Pekanbaru, 16 Agustus 2022
Wakil Dekan I/~~Ketua Departemen~~/Ketua Prodi

MTCXMDEWMJC1

(SELVI HARFIA SANTRI, S.H., M.H)

Scanned by TapScanner

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISI KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

ZALWI AFRIDHO
NPM : 161010408

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Scanned by TapScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 639 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk

Nama	:	**Endang Suparta, S.H., M.H**
NIP / NPK	:	**14 10 02 493**
Pangkat/Jabatan	:	**Penata /III/c**
Jabatan Fungsional	:	**Lektor**

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama	:	**Zalwi Afridho**
NPM	:	**16 10 10 408**
Prodi / Departemen	:	Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	:	**Analisis Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 November 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Scanned by TapScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 258 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Zalwi Afridho
N.P.M.	:	161010408
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Endang Suparta, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Evi Yanti, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 19 Agustus 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 258/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022***, pada hari ini ***Rabu, 24 Agustus 2022*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Zalwi Afridho
N P M	:	161010408
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian	:	24 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	14.00 – 15.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan Secara Daring
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	**Tanda Tangan**
1. Endang Suparta, S.H., M.H	1. Hadir
2. Yuheldi, S.H., M.H	2. Hadir
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Evi Yanti, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 24 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pada era globalisasi ini, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah pada penggunaan kendaraan bermotor, ditambah dengan penduduk yang relative berusia muda dan banyaknya jenis kendaraan bermotor yang mengakibatkan masalah keselamatan jalan yang semakin memburu. Sedikit menjelaskan tentang kendaran bermotor, berdasarkan, Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 1 (10) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu". Selanjutnya menurut "Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dalam Pasal 2 ayat (1) pengelompokan kendaraan bermotor dalam beberapa jenis, seperti: kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan khusus.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah anak yang tidak memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) berdasarkan apa saja faktor terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) diwilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Serta bagaimana upayaan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam Menanggulagi Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dikelompokan dalam jenis penelitian hukum sosisologis atau empiris maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau sesuai dengan yang terjadi ditengah masyarakat. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Polres Resort Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dsekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu kurang tanggapnya terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Saran dari penelitian ini antara lain adalah perlunya penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, campur tangan Kepolisian Dan Hakim dalam memberi Keputusan terhadap anak yang adil dan berperikemanusiaan, pentingnya penambahan modal transportasi umum dijalan-jalan kecil untuk mempermudah akses kejalan raya, pentingnya peranan orangtua dalan pengawasan dan segala kegiatan anak dilingkungan agar mendapat wawasan yang sesuai dengan prosedur dan UndangUndang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang lalulintas dan angkutan Umum Mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kata Kunci: Pelanggaran Lalulintas, Surat Izin Mengemudi (SIM), Anak

ABSTRACT

In this era of globalization, the needs of the community are increasing, one of which is the use of motorized vehicles, coupled with a relatively young population and the many types of motorized vehicles which result in increasingly hunting road safety problems. To explain a little about motorized vehicles, based on the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 Article 1 (10) motorized vehicles are vehicles that are driven by technical equipment that is on the vehicle". Furthermore, according to "Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 44 of 1993 concerning Vehicles and Drivers in Article 2 paragraph (1), motorized vehicles are classified into several types, such as: two-wheeled vehicles, four-wheeled vehicles, and special vehicles.

The formulation of the problem in this study is children who do not have a driving license (SIM) based on what factors are the occurrence of traffic violations by children who do not have a driving license (SIM) in the Pekanbaru City Police Resort area. And how are the efforts of the Pekanbaru City Police Resort in Overcoming Traffic Violations committed by children who do not have a driving license (SIM).

The research method used is research that is grouped in the type of sociological or empirical legal research, the first step is to collect secondary data, then proceed with research on primary data in the field or according to what is happening in the community. This research is classified as research with qualitative data type, namely by managing primary data sourced from the Resort Police of Pekanbaru City.

The results of this study indicate that traffic violations committed by minors are still common and the factors that cause high traffic violations committed by minors are family factors, educational factors, school and social or environmental factors, and the application of law. against criminal acts of traffic violations committed by minors, namely the lack of responsiveness to violations, non-optimal action, and maximum prosecution. Suggestions from this study include the need for counseling or outreach to the community, the intervention of the Police and Judges in giving decisions to children who are fair and humane, the importance of increasing public transportation capital on small roads to facilitate access to the highway, the importance of the role of parents in supervision and all activities of children in the environment in order to gain insight in accordance with procedures and Law No. 22 of 2009 Article 77 concerning traffic and public transportation regarding driving licenses (SIM).

Keywords: Traffic Violations, Driving License (SIM), Children

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahrnya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis sendiri sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini. shalawat dan salam *AIallahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*

Kepada Nabi Muhammad SAW, Serta kepada Kepada Kedua orang tua penulis terimakasih atas Doa dan Dukungan materil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak yang Tidak Memiliki Surat Izin mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru."

Disamping itu juga penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjna Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penelitian Skripsi ini penulis mendapatkan dukungan baik materi maupun Moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan Terimakasih yang Sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis agar masuk di Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih atas waktu yang telah diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftarakan komperhensif ;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Terimakasih atas waktu yang telah diberikan dalam menyususn administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr Zulkarnain S, S.H.,M.H Selaku Kepala Departemen Hukum Pidana.
7. Bapak Endang Suparta S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi Terimakasih atas waktu nya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
10. Kepada Noventa Dwi Damayani, Keluarga Himpunan Mahasiswa Adminitrasi Negara.
11. Kepada Keluarga besar saya, yang selalu menyuport dan mendoakan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan suport selama masa perkuliahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis menyadari penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang gunanya untuk dalam perbaikan serta kesempurnaan penulisan ini, sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 3 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **ii**

SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **vi**

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING ..... **vii**

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI ..... **viii**

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Mangfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 35

F. Metode Penelitian 38

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalulintas 43

B. Tinjauan Umum Anak 72

C. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru 95

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas
oleh anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru 102

B.Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu LintasYang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pada Era Globalisasi ini, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah pada penggunaan kendaraan transportasi, Menurut salim Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu temoat ketempat lain.[1] ditambah dengan penduduk yang relative berusia muda dan banyaknya jenis kendaraan bermotor yang mengakibatkan masalah keselamatan jalan yang semakin memburuk. Sedikit menjelaskan tentang kendaran bermotor, berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 1 (10) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada

[1] Salim. H.A. Abbas, 2002, Manajemen Transportasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 9.

pada kendaraan itu.[2] Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dalam Pasal 2 ayat (1) pengelompokan kendaraan bermotor dalam beberapa jenis, seperti: kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan khusus[3].

Untuk mengoperasikan kendaraan bermotor tersebut sesuai fungsinya, tentu saja memerlukan jalan. Berdasarkan "Undang-Undang Republik Indonesia No.38

Tahun 2004 Pasal 1 (5)[4]

Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan yang diperlukan bagi lalulintas yang berada pada permukan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dibawah permukaan atah/air, diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Maka dari itu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 Pasal 1 (5) diadakanlah jalan umum bagi pemilik kendaraan bermotor pribadi, untuk mengoperasikan dan menjalankan kendaraan bermotor tersebut, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum[5].

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran terhadap tertib dijalan umum masih rendah, sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama kendaraan bermotor misalnya menerobos rambu-rambu lalulintas, hal ini yang merupakan faktor pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalulintas.

---

[2] Pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[3] Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[4] Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
[5] Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan "Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 (10) Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, Angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya". Jadi lalulintas dapat dikatakan sebagai gerak orang dan kendaraan didalam lingkup lalulintas dan jalan[6].

Dari sinilah pentingnya peraturan undang-undang lalulintas. Undang-undang lalulintas merupakan hal yang harus dijunjung tinggi di setiap negara. Hal tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dan semua orang tidak akan bertindak sewenang-wenang dan tidak memikirkan kondisi orang lain.

Pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh anak, antara lain : seringnya para pengendara sepeda motor tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan/racing, mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hukum masyarakat dalam hal ini anak masih kurang, padahal serangkaian aturan yang dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.

Sangat jelas bahwa pengaturan setiap orang yang mengendarain kendaraan bermotor harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagai diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yakni:

1. Seluruh pengemudi kendaraan roda dua dijalan haruskan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai.
2. Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1 terdapat dua jenis, sebagai berikut:
   a) SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan pribadi
   b) SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan umum

[6] Pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. SIM (Surat Izin Mengemudi) didapatkan dengan mempunyai keahlian melalui pembelajaran dengan sendiri.
4. SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi angkutan umum didapatkan dengan cara pendidikan serta pelatihan pengemudi angkutan umum.
5. Dalam ayat 4 pendidikan serta pelatihan pengemudi untuk angkutan umum, hanya bagi yang telah memiliki surat izin mengemudi perseorangan[7].

Kecelakaan lalulintas pada anak dengan menggunakan sepeda motor sangat bersiko. Disebabkan karena masih sangat labilnya jiwa bagi anak, lalai serta tidak berhati-hati dalam mengemudi, sedikitnya pengetahuan terhadap aturan lalu lintas, dan lainnya.[8] Anak yang belum memiliki surat izin mengemudi(SIM) dari kepolisian, tidak diizinkan mengendarai sepeda motor.

[7] Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[8] Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, 2018, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Samarinda, Hal. 330

Berdasatrkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1. Dalam pasal ini mengatur bahwa Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi(SIM) sesuai kendaraan yang digunakan". Berdasarkan "Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 81. Menjelaskan syarat usia mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun. Sedangkan untuk mengurus SIM B1 minimal usia yang dipersyaratkan adalah 20 tahun, SIM B2 minimal berusia 21 tahun[7].

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 281. Pasal ini menjelaskan tentang ancaman bagi yang tidak memiliki SIM. Bahwa, pengemudi

[7] Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak menunjukkan SIM bisa terjerat pidana kurungan penjara selama maksimal 4 (empat) bulan, atau denda maksimal 1 juta rupiah[8].

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4). Disebutkan bahwa, jika dalam berkendara tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, ada ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 12 (dua belas juta rupiah)[9]. Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2011 tentang sistem Peradilan Anak terkait hukuman pidana anak dalam kecelakaan lalulintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dijatuhi sanksi pidana $^1/_2$ (setengah) dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yaitu 3 (tiga) tahun[10]. Hal ini semata-mata diberikan dengan tujuan untuk melindungi anak dari akibat buruk pidana penjara[11].

Dalam hal ini peran dari setiap penegak hukum serta dalam hal ini peran orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena citra hukum dari suatu negara akan dilihat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh para aparatur negara.

Suatu kenyataan bahwa tindak pindana terjadi di lingkungan masyarakat selalu mengakibatkan dan berdampak kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, baik kerugian moril maupun kerugian barang[12]. Di dalam KUHP, pidana itu terbagi dua

[8] Pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[9] Pasal 310 ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak

[11] Sudiro, Rahtami Susanti, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pada Kecelakaan lalulintas yang Menyebabkan Matinya Orang, LLPM- Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Jurnal Analisis, 184

[12] Lase Mardivon, 2015, Kepolisian dalam Mengendalikan Demontrasi di Wilayah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu, Kejahatan *(missdriff)* dan Pelanggaran *(overtrading).* KUHP tidak memberikan ketentuan syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.

Aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang penting sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau perbuatan pemakai jalan yang melanggar ketentuan lalulintas. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 200 (3) Huruf H, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalulintas dan angkutan
jalan[13].

Namun sangat disayangkan masyarakat di Indonesia kurang menyadari akan pentingnya surat izin mengemudi bagi pengendara lalulintas, di Indonesia ketidak sadaran masyarakat terhadap surat izin mengemudi terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi, terutama di Kota Pekanbaru sendiri terutama pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermotor sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data yang di dapat dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana jumlah keseluruhan bagi pelanggar lalu lintas terhadap anak pada Tahun 2020 mencapai 1.665, yang mana data tersebut sudah dijumlahkan dengan keseluruhan pelanggaran lalu lintas terhadap anak pada tingkat SD sebanyak (249 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak pada tingkat SLTP sebanyak (906 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah usia 17 tahun sebanyak (510 pelanggar).

Hukum Polresta Pekanbaru, Jurnal Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 3

[13] Pasal 200 ayat 3 Huruf H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel. 1.1
Pelanggaran Lalulintas Tidak memiliki SIM yang di lakukan oleh anak berdasarkan pendidikan dan usia pada tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH	GOLONGAN		
			SD	SLTP	USIA<17 TH
1	JANUARI	151	76	107	54
2	FEBRUARI	364	53	210	101
3	MARET	339	21	236	82
4	APRIL	236	11	172	53
5	MEI	1	-	-	1

6	JUNI	48	8	20	20
7	JULI	95	17	11	67
8	AGUSTUS	74	12	17	45
9	SEPTEMBER	59	-	24	35
10	OKTOBER	56	10	46	14
11	NOVEMBER	78	24	38	16
12	DESEMBER	64	17	25	22
	JUMLAH	1.565	249	906	510

Sumber: Satlantas Polres Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang didapat dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pelanggaran lalulintas pada anak yang tidak memiliki SIM tetap ada, walaupun jumlahnya tidak satabil, dengan adanya data tersebut terlihat bahwa lemahnya pelaksanaan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari sebagian banyak telah mendapatkan sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak tidak dapat didiamkan dan dianggap remeh karena anak merupakan generasi penerus bagi bangsa yang harus tumbuh dan berkembang baik maupun secara fisik, mental serta lingkungan sosialnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masih banyak lagi anak yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi yang belum di terlihat oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia bertugas sebagai penegak hukum dalam terciptanya keamanan di dalam negeri demi terjaganya ketentraman dan kedamaian masyarakat, dan taat aturan, menjaga, mengayomi dan melayanan masyarakat, terbentukan asai manusia demi terbentuknya kedamaian masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu masalah bagi pengendara lain yang memiliki surat izin mengemudi, dikarenakan apabila anak yang mengemudikan tanpa memilik surat izin mengemudi (SIM) setelah itu mengalami kecelakaan, sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan keadaan yang kurang aman dan nyaman bagi pengguna lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis tertarik dan akan mengkajinya dengan judul : **"Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak yang Tidak Memiliki Surat Izin mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru."**

B. Rumusan Masalah

Mengurai dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumusan rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab faktor terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Begaimana upayan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pelangaran lalulintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu :

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui upaya aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mencegah pelanggaran lalulintas oleh anak di Resor Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

a. Dapat memberikan bahan pemikiran yang berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis miliki serta dapat mengaplikasikan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selama menghadapi penelitian.

b. Dapat menjadi bahan referensi sekaligus kritik terhadap pemerintah, orang tua, dan penegak hukum didalam menanggulangi kasus seperti ini.

c. Sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan ilmu hukum bagian pidana. Dan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

A. Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studynya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak terdakwa maupun korban kejahatan, disamping untuk perundang undangannya sendiri.[14]

H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat dibagi dalam dua kajian, yaitu Kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu pengetahuan yang membahas masalah masalah kejahatan mengenai bentuk bentuknya, sebab dan akibat akibatnya, yakni dangan istilahnya : *Phaenomenolog* (bentuk bentuk perbuatan jahat), *Aetiologi* (sebab-sebab kejahatan), *Penologi* (akibat kejahatan).

Kriminologi dalam arti luas ialah semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara agar menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum, yakni meliputi: penyelidikan perseorangan misalnya pembicaraan lisan secara langsung pada penjahat kepada saksi-saksi dan korban, penyelidikan terhadap bekas sidik jari, ilmu racun, ilmu kedokteran kehakiman, dll.[15]

Apabila suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolo ngkan dalam tiga aspek,

[14] Zulkarnain S, SH., MH, 2016, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, Vol. 55
[15] Ibid Vol. 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

iyalah:[16]

a. Yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

b. Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai mahluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.

c. Psikologis

Merupakan keadaan perbuatan manusia yang melanggar peraturan yang ada pada masyarakat. Tingkah laku yang bertolak belakang dengan norma yang ada dalam masyarakat merupakan sikap yang bertolak belakang pada jiwa seseorang.

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajaran tentang keahatan. Kriminologi ditemukan oleh seorang Amtropologi yaitu Paul Topinard untuk pertama kali yang berasal dari Perancis, bahwa : Kriminologi ialah suatu cabang

[16] Arrasjid, Chainur, 1994, Suatu Pemikiran Tentang Pisikologi Criminal, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, Medan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ilmu tentang kejahatan. Kriminologi berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.[17]

Agar lebih dipahamin, ada seberapa pandangan dari ahli kriminologi, sebagai berikut :

Menurut Seojono Dirjosiswaro kriminologis terdiri dari suka crimes yaitu kejahatan dan oagos yaitu ilmu pengetahuan. kriminologi merupakan ilmu pengetahaun yang mempelajaran segala kejahaatan kejaahatan dilakakunnya.[18]

Menurut J.Constant kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.[19]

Menurut Suntherland kriminologi sebagai keselaruhan pengetahuaan yang berikatan dengan perbuatan jahet sebagai gajela sosial. Menurut Suntherland kriminologi mencakup prosas-proses pembikinan hukum, pelangar-pelanggaran hukum. Kriminologi dipecah memnjadi 3 cabeng pengetahuan awal, berikut : [20]

1. Sosiologi hukum

   Kejahatan merupakancperbuatan dilarang oleh hukum dan diberlakukan hukuman, oleh karna itu hukumlah yang menentukan tindakan itu sebagai

[17] Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Hal.11

[18] Dirdjosisworo, Soedjono, 1985, Krominologi Tentang Pencegahan Sebab-Sebab Terjadinya kejahatan, Politeja, Bogor

[19] Ilyas, A.S Alam dan Amir, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar

[20] Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Hal.7

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kejahtaan. Agar berkembangnya hukum dilakukannya penyelidikan untuk mencari faktor-faktor penyebab.

2. Sebab pelanggaran

   Merupakan pencarian faktor kejahatan. Dalam kriminologi, etologi kejahaan merupakan hal yang awal dan penting.

3. Penalogi

   Umunmya tentang delik, sedangkan Suntherland memasukkan berhubung tentang usahaan pengendali kejahnatan respresif maupum perventif.

Paul Mudilgo Mulyano tidak sepedapat dengan dafinisi Suntherland. Memnurutnya definisi itu tidak menmiliki pandangan bahwa paleku kejahataan tidak ada hak dalam melakukan kejahatana, karena terjadinya kejahataan bukan hamya perbuatan yang tidak diterima oleh mansyarakat, tetapi sipelaku pemikran keiginanan untu k melaksanakan perbuatan yang tidak diterima oleh mansyarakat. Karenanya Paul Mudilgo Mulyomo menjelaskan kriminologi pelajaran kejahataan tentang manusia.[21]

Michael dan Adler krinminologi adalah perbuatan dan sikap dari para pelaku kejahatan secara menyelurus, mengakibatkan diperlakukaan dengan lembaga pengamanan mansyarakat[22]

Wood mengemukakan kriminologi melingkup pelajaran yang diperoleh dari orang yang melakukan kejahatan, berikatan dengan tingkah laku dan orang

[21] Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Hal.11
[22] Ibid, Hal 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang melakukan kejahatan, dan pendapat masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum.

Pendapat Noach kriminologi sebagai pelajaran terhadap perilaku tercela dan berikatan dengan orang yang beperilaku tidak terpuji.[23] Pendapat Wolfngang, Savits dan Johston dalam bukunya memberikan arti kriminologi sebagai gabungan ilmu, perbuatan kejahatan berpusat mendapatkan ilmu tentang masalah kejahatan melalui pelajaran, menyelidiki secara keilmuan keterangan keseragaman, pola dan factor-factor umum berhubung tentang perbuatan jahat, yang berbuat jahat dan tanggapan masyarahat kepada keduanya. Oleh karena itu, sumber pelajaran kriminologi meringkupi :[24]

a. Perbutan sebagai delik
b. Pelaku delik
c. Tanggapan mansyarakat dituju kepada perilakunya.

Ketigaanya menjadi satu. Suatu tindakan bisa dikatakan kejahataan dengan tanggapan oleh mansyarakat. Damikian pula manurut W.A.Bonger, memngemukakan bahwa Krinminologi adalah ilmu pemngetahuan yang bertujuan untuk mengetahuan gejala seluruhan kejahatan.[25]

Dalam definisi krinminologi menurut W.A.Bonger kriminologi murni, separti:[26]

1. Antroplogi

[23] Ibid, Hal 12
[24] Adang, Yesmil Anwar, 2013, kriminologi, PT. Reflika Aditama, Bandung Hal.5
[25] Ibdi, Hal. 7
[26] Ibid, Hal.9-10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ialah pelajaran tentang manusia yang jahat. Ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda ras dengan perbuatan jahat seterusanya.

2. Soiologi

   Iyalah ilmu kejahatan suatu kondisi masyarakat. inti yang diberikan yang terletak dalam mansyarakat.

3. Psikologi

   Pelajaran tentangan ilmu jiwannya.

4. Pskopatologi

   Ialah ilmu tentang orang yang melakukan kejahatan karena bermasalah syarafnya.

5. Penologi

   Tetang badannya dan berkenbangnya hukumaan.

Menurut Topo Santoso memberikan pendapat bahwa :[27]

Kriminologi menjelaskan perbuatan jahat sebagai satu masalah sosial sehingga orang yang melakukan tindakan jahat tidak terpisah dari hubungan dengan masyarakat, artinya kenjahatan menarek perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang disarankan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan gabungan ilmu dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola-pola dan faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara tanggapan masyarakat terhadap keduanya.

[27] Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010). hal. 9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Studi kriminologi Memnurut Topo Sentoso, meliputi :[28]

Kejaahatan, pelaku kejahataan, sikap mansyarakat yang dituju baik terhadap perbuatan manupun pelakunya.

Ada 3 (tiga) bagiaan dalam mansalah kejahataan, yaitu :[29]

a. Secara luas

Pandangan luas ini, menjelaskan bentuk sosial sosial dan akibatnya, dan memusatkan kepada orang yang berbuat jahat. Seperti: teori amoni teori konflik.

b. Secara sempit

Pandangan secara sempit ini mengartikan seorang mansyarakat berbuat jahat atau didalam masyarakat terdapat seorang ateu sekelompok individu yang tidak menlakukan perbuatan jahat.

c. Secara Brdging

Teori yang mengartikan terhadap pola masyarakat bagaimana sekelompok jadi orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya, menurut A.S Alan mengenai pandangan sosiologi tentang kejahatan.

2. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak tidak ada habisnya karena anak merupakamn calon pemimpin dimasa depan, dengan sifat menuju dewasa dengan rasa ingin tahu yang tinggi, maka dibutuhkan bimbingan. Melindungi anak Indoneesia berarti menjaga bangsa indonesua, menuju masyarrakat yang adil dan makmur.[30]

---

[28] Ibid, Hal. 11

[29] Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Bandung, Hal. 33

[30] Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal ini permasalahan yang tepat adalah banyak para anak yang tidak menaati peraturan lalulintas berupa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),tidak menggunakan hlem, dan sebagainya. Karena belum adanya kesadaran dan tidak adanya yang membimbing dalam berlalulintas. Anak termasuk suatu pelaku pelanggaran lalulintas, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukunm yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan :

"Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 16 tahun untuk menperolah SIM C dan D", selain itu ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, bahwa "batas usia minimal untuk memperoleh SIM A adalah 18 tahun".

Maka dari itu seorang yang tidak berusia 16 tahun (untuk pengendara kendaraan roda bua) dan belum berusia 18 tahun (untuk pengendara kendaraaan rodaa empat), dapat dikelompok kan[31]

Berdasarkan UU, menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang tidak mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. "Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tenmtang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[32]

Pengemnudi sepeda mnotor oleh anak mempunyai sifat yang tidak taat. Suatu sikap di katakan berlebihan jika dibuat secara sengaja, berakibat kecelakaan

[31] Moeljatno, 1998, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 46

[32] Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 33-34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lalulintas karena tidak sabar dalam mengendarai,dan usaha untuk mempercepat waktu.[33]

Mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga berarti berbicara mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, yang berasal dari *juvenile* artinya young, anak- anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya wrong doing, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain[34]

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[37]

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah, *Juvenile Delinquency* itu menurut Alder, adalah :

Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

---

[33] Usman, Sunyoto, 2006, Kenakalan Remaja Perkotaan, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, Hal. 3

[34] Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kenakalan anak tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini berupa perbuatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Penyebab terjadinya kenakalan anak dapat di pengaruhi berbagai faktor, maka dari itu penulis akan memaparkan berbagai teori yang menjadi penyebab kenakalan anak.

[37] Kartini Kartono. (2011). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 6

3. Teori Dalam Terjadinya Pelanggaran

A. Teori Motivasi

Menurut Ernawati Waridah, S.S. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2017, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.[35]

[35] Ernawati Waridah, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Bmedia,Jakarta, Hal . 47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.[36]

Kedua motivasi di atas dapat mempengaruhi atau mendorong anak dalam melakukan kenakalan atau dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. Melihat dari dua pengaruh di atas maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.

a. Motivasi Intrinsik

1. Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan mengambil keputusan. Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor kecerdasan anak. Seorang anak yang memiliki kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang, mereka dengan mudah melakukan hal-hal negatif yang merupakan pengaruh dari yang dilakukan oleh orang disekitarnya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. Faktor intelegensia merupakan salah satu faktor pendukung anak melakukan suatu kenakalan[37]

Kecerdasan anak mengenai wawasan berlalu lintas yang kurang dan adanya sikap yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, menjadi salah satu latar

[36] Atmasasmita, Romli, 1984, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Rajawali, Bandung, Hal. 25
[37] Ibid, Hal. 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belakang seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai mengenai peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pula pengendara kendaraan bermotor utamanya pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat berujung terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bukan saja bagi anak tetapi juga bagi orang dewasa yang menjadi contoh dalam berperilaku bagi anak.[38]

Seorang anak mematuhi peraturan lalu lintas hanya bila mereka melihat petugas kepolisian sedang berjaga ataupun berpatroli dan anak sebenarnya mengetahui perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas, tanpa memikirkan bahaya yang akan timbul nantinya. Hal ini menunjukan bahwa intelegensia atau pengetahuan seorang anak mengenai peraturan lalu lintas dan resiko mengendarai kendaraan bermotor masih kurang.[39]

2. Faktor Usia

Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam timbulnya suatu kejahatan atau kenakalan anak. Stephen Hurwitz mengungkapkan *"age is importance faktor in the causation of crime"* (usia adalah faktor penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Dimana dalam hal ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol emosinya atau emosi anak yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan

[38] Ibid, Hal. 27
[39] Ibid, Hal. 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan cepat, serta rasa tanggung jawab yang masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran dalam hal ini pelanggaran lalu lintas.[40]

Pada umumnya saat usia pelajar ini, seseorang cenderung ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba mencari identitas dirinya serta sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya sehingga dengan mudah pula melakukan pelanggaran.

Anak pada usia pendidikan SMP dan SMA merupakan usia yang sangat rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada diri mereka. Ketika anak mengalami peningkatan usia tentu lingkungan mereka dalam bergaul pun akan ikut mengalami perubahan. Dari lingkungan baru inilah anak akan mendapatkan pengaruh dari orang lain maupun lingkungannya, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk.

b. Motivasi Ekstrinsik

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak, terutama anak yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah. Oleh karena iti, keluarga memilki peranan yang penting dalam perkembangan seorang anak. Keluarga yang baik akan berpenaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang

[40] Atmasasmita, Romli, Ibid, Hal. 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

buruk akan menimbulkan pengaruh negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah bila faktor keluarga sangat berpengaruh bagi perilaku anak[41]

Anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya berada di dalam lingkungan keluarga, maka segala perbuatan yang dilakukan anak sebagian besar merupakan pengaruh yang berasal dari keluarga. Pentingnya peran keluarga terutama orangtua bagi perilaku dari seorang anak dalam melakukan kenakalan/pelanggaran. Dalam hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh seorang anak. Orangtua saat ini cenderung untu memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka gunakan, seperti membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri.

Disiplin merupakan sikap dan perilaku patuh terhadap nilai, norma dan juga moral yang berlaku di masyarakat. Sikap disiplin timbul karena adanya pendidikan dasar dari orang tua sebagai sekolah pertama bagi anak, terutama dalam penanaman sikap baik itu disiplin atau yang lainnya dan juga katakter hal ini akan melekat hingga anak ini tumbuh dewasa. Seorang anak akan bersikap sesuai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga lingkungan sekolah. Namun yang dirasa sangat penting adalah lingkungan keluarga yang mana anak ini akan dididik dari usia dini. Dalam pengenalan-pengenalan baik itu nilai, norma dan juga moral yang berlaku dimasyarakat ini haruslah ditanamkan sejak dini agar

[41] Atmasasmita, Romli, Ibid, Hal. 50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketika berajak remaja hingga dewasa, anak ini telah terikat dengan hal-hal tersebut. Termasuk dalam berada di jalan dengan aturan lalulintas, seorang anak harus ditanamkan pengetahuan aturan lalulintas dan juga sikap disiplin utuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan para pengguna kendaraan bermotor..[42]

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak- anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (karakter). Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah linkungan keluarga/rumah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yanng sehat kepada anak

tersebut.[43]

Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah juga memberikan batasan bagi siswanya mengenai larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi siswa yang belum mendapatkan SIM. Anak sebagai siswa sekolah banyak diantara mereka masih dibawah 17 tahun sebagai salah satu syarat mendapatkan SIM sesuai dengan UU LLAJ. Dari hasil penelitian dengan anak yang ada di Kota Pekanbaru, alasan anak menggunakan kendaraan bermotor karena kebutuhan mereka untuk ke sekolah, dimana jarak yang ditempuh cukup

[42] Budiman, Novita Indriani, 2017, Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalulintas Yang dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar Hal. 49

[43] Ibid, Hal. 51

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jauh dan orangtua tidak memiliki waktu untuk mengantar maupun menjemput anak, selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat bila menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum.

Kurangnya kepedulian dari pihak sekolah mengenai penggunaan kendaraan bermotor kepada siswanya yang mendorong anak tersebut menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah juga ikut memperhatikan hal ini untuk memberikan nasehat kepada setiap siswanya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor bila tidak memenuhi peraturan lalu lintas yang ada, atau dengan membuat aturan yang melarang siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Peraturan ini juga dapat di dukung dengan menyediakan kendaraan khusus bagi siswa yang berfungsi untuk mengantar dan menjemput siswa untuk kesekolah. Dengan cara seperti ini maka anak kiranya dapat memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.[44]

3. Pergaulan Anak

Pengaruh lingkungan terhadap anak memiliki dampak yang besar, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Seorang anak dapat melakukan kenakalan/pelanggaran karena salah satunya faktor lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang membawa pengaruh negatif bagi anak tersebut. Dampak dari pergaulan yang negatif memberikan anak tekanan dan memaksa pembentukan perilaku yang buruk krpada seorang anak dimana dalam hal ini anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

[44] Ibid, Hal. 52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seorang dan memiliki indicator sebagai berikut[45]

1. Pengetahuan tentang Peraturan

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya berbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentinngan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan

Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

3. Sikap hukum

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai yang dianut di dalam aturan-aturan tersebut.

4. Perikelakuan hukum

[45] Abdullah, soejono soekanto & Mustofa, 1980, Sosiologi Hukum dan Msayarakat. Rajawali. Jakarta, Vol. 96, Hal. 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan namapak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Dikatakan relatif oleh karena ketataan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu yang mungkin disebabkan:

1) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat dari melanggar hukum
2) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan
3) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa
4) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijjamin dan dilindungi hukum.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Pencegahan Kejahatan

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif.[46]

a. Pre-emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan

[46] M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 109 - 114

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Pre-ventif

Upaya pre-ventif ialah kelanjutan dari upaya pre-emtif yang masih dalam tahap penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya pre-ventif adalah mentiadakan untuk melakukaan kejahatan.

c. Reperesif

Upaya ini dilakukan ketika telah terjadi kejahatan yang upayany penegakkan (*law enforecemen)* dengan memberikan sanksi. Pencegahan yang dilakukaan ialah menghukum para penjahat sepadan dengan yang dilakukannya serta mengubah sikapnya kembali supaya mereka sadar bahwa perebuatan yang dilakukannya adalah sikap yang tidak menguntungkan masyarakat.

Ada beberapa langkah penanggulangan kejahatan menurut Purniati dengan cara non konvensional, seperti Stabilitas aparat hukum dan jajalannya, stabiliitas hukum dan perundanga, stabilitas sistem paradilan. kelompok kordinatif amtara praktis hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hukum dengan instansi yang ada seperti : lembaga pendidik, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. penjagaan penduduk dalam wujud keamanan swakarsa.[47]

Konsep sebelum terjadinnya perbuatan jahat, menurut Purmiati lebih baik mencegah dari pada menangulangi, dikarenakan sebagai berikut :[48]

a. Pecegahan tidak rumit dan lebih ekonomi dibanding sudah terjadi

[47] Darmawan, Purniati dan Moh Kemal, 1994, Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87

[48] Ibid, Hal. 89

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tidak menimbulkan kerugian terhadap sitigma, pengasingan dan penjara maaupun korban jika dicegah

c. Adanya usaha dalam mansyarakat dan menciptakannya rasa kekeluargan.

Dengan adanya pencegahan, dalam ilmu kriminologi terdapat 2 (dua) hal pencegahan kejahatan depat berupa: *pertaama*, cara "morelistik" yaitu sistem pencegahan perbuatan jahat dengan lebih memusatkan kepada cara malakukan pelajaran moral atau ahlak dan budi pekerti, agar mansyarakat tidak bertindak tidak baik atau jadi korban terhadap tindakan jahat. *Kadua,* cara "aboilisionistik" yaitu sistem pencegahan perbuatan jahat dengan menitik beratkan atau menghapus factor-factor yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan jahat.[49]

2. Teori Penegakan Hukum

Prinsip dasar negara hukum ada tiga yaitu: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum. Penegakan hukum,[5051] dapat dikemukakan pendapat dari Lawrence M.Friedman yang mengatakan berhasil atau tidaknya penegakan dalam sebuah negara menciptakan perdamaian dan ketertiban merupakan suatu keharusan. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum, pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Tujuan gabungan fungsi dalam kerangka criminal justice system untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.[52] Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

[49] Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, Hal. 157

[50] Samsi, Siti Chomarijah Lita, 2009, Integritas Hakim, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hal. [51]

[52] R. Muklis, 2011, Skripsi Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi keputusan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undangundang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.[53]

Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:[54]

a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan terbuat lagi (percobaan);
b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian,denda);
c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. [55] Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan.[56] Dan pendapat lain menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah

---

Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Fakutus Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hal. 222

[53] Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 45

[54] Khadir, Abdul, 2001, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 46

[55] Ibid, Hal. 49

[56] Raharjo, Stjipto, 2008, Penegakan Hukum Suatu tinjauan sosial, Genta Publishing, Jakarta. Hal. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[57]

Dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat. Yang dimana pengertian dari kesadaran masyarakat tersebut merupakan tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia.[58] Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu menyelesaikan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud kebahagiaan.

[57] Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 5
[58] Erwin, Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sama halnya dengan kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilainilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu

135

populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.[59]

Dalam suatu penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu:[60]

1. Substansi hukum adalah norma (aturan,keputusan) hasil dari produk hukum.
2. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
3. Budaya hukum adalah ide, prilaku, keinginan, pendapat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif).

[59] Ibid, Hal. 7

[60] Soekanto, Soerjono, op.cit. Hal. 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Teori Friedman dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum dan melihat implementasi pelaksanaan di masyarakat, yaitu dapat tidaknya peraturan hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik melalui beberapa faktor di bawah ini yang harus difungsikan dengan benar, yaitu sebagai berikut:[61]

1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. Sikap yang lugas (Zalkelijk) dari para penegak hukum.
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama di tujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimanfaatkan sistem koordinasi serta tugastugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakkan kepada hukum dan penegak-penegaknya. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah hukum. Oleh karena itu penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan peraturan

[61] Fuady, Munir, 2003, Aliran Hukum Kritis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan, walaupun di dalamnya Indonesia kecenderungan demikian sehingga teori penegakan hukum begitu terkenal dan fenomenal.[62]

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam perhubungan anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak masyarakat itu.[63] Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Hal ini sudah sangat jelas tetapi pada kenyataannya banyak peraturan yang tidak dijalankan oleh pihak terkait.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman agar di dapat kesatuan pandangan dalam penulisan ini sesuai hingga bermakna sesuai yang diinginkan maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian ini, antara lain:

Menurut Ernawati Waridah, S.S. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2017 Analisis adalah mencari suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[64]

---

[62] Ahmah, 2007, Hukum Persaingan Usaha, Cv Social Politic Genius, Makasar, Hal. 38
[63] C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 40
[64] Ernawati Waridah, S.S., 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Bmedia, Jakarta, 17

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ilmu yang mendalami kejahataan tentang peristiwa umum sehingga pelaku kejahatan tidak dapat melepaskan diri dari keadaan sosial, maknanya tindakan tersebut dipengaruhi oleh perbuatan kejahatan, yang dianjurkan dalam hubungan antar manusia maka pengertian ini yang dimaksud dengan kriminologi. Kumpulan ilmu tentang pemahaman yang menganalisis gejala kejahatan secara keilmuan keberagaman, pola dengan sebab penting yang berkaitan tentang kejahataan, pembuat kejahatan, secara sikap masyarakat umum terhadap keduanya adalah arti kriminologi.[65]

Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan Menimbulkan akibat hukum. Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kata lain pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melangar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan[66]

Kegiatan dalam berlalulintas dibutuhkan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran lalulintas, karna lalulintas merupakan gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Meskipun beberapa peraturan telah dibuat tetap saja terjadi pelanggaran bahkan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dalam "UndangUndang No 22 tahun 2009 didefinisikan lalulintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan

[65] Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. 2020, Kriminologi : Sebuah Pengantar, Buku Litera, Yogyakarta, Hal. 2

[66] Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ruang lalulintas jalan adalah fasilitas gerak kendaraan, orang, barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung".

Dalam pengertian Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, anak adalah subjek hukum yang belum cukup umur, yang berada dibawah kuasa orang tua atau walinya.[67] "Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa orang yang daalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun dan belum sampai umur 18 tahun dan belum kawin". Sedangkan "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan memcakup juga anak dalam kandungan".

Mulyana W. Kusuma, yang anak iyalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa diakibatkan peraturan (mental, fisik masih belum dewasa) dan juga sebagai pembuat, korban, pengamat atau saksi[6869]

Polisi memiliki peran sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan agar masyarakat hidup dan beraktivitas dalam kondisi aman dan tentram[70]

Tugas Polisi lalu lintas mengawasi, menjaga agar transportasi berjalan dengan lancar dan efisien, hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Raardjo berpedapat bahawa penegakan hukum iyalah bentuk

---

[67] Hamzah, Andi, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 10
[68] Kusuma, Mulyana W., 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. [69]

[70] Efendi, Bahtiar, 1981, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Analisis, UGM, Yogyakarta, Hal. 31

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

usaha dalam mewuyudkan usaha dan konsep menjadi kenyataan[71] Berdasarkan "Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolian Negara Repubik Indoneia dalam Pasal 1 angka 1 kepolisian merupakan segala hal yang menyangkut dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perndang-undanan".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di tempuh untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun metetode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisis pokok permasalahan, adalah sebagaii berikut :

1. Jenis penelitian

   Penggunaan metode dalam pelaksanaan sangat penting, karena dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. maka untuk memperoleh dan menganalisis data diperlukan suatu metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, menurut[72] Penelitian yang digunakan untuk menanalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Data yang digukanan serta sumbernya data Dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber yaitu :

[71] Rahardjo, Sarjipta, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 40

[72] Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development: Untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2015, h. 21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Data Primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari objek pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.[73]

b) Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari buku-buku sebagai data lanjutan dari sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data dari pembelajaran pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan jurnal.[74]

3. Lokasi Pemelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisiian Rsesor Kota Pekanbaru, Karena tingginya angka pelanggaran lalulintas pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dibanding dengan kota lainnya yang berada di provinsi Riau. Selain itu di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari provinsi Riau tersebut, dan menjadi pusat kota serta pusat pendidikan di provinsi Riau. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini di wilayah hukum Kepolisian Resort kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang mempunyai sifat-sifat umum. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

[73] Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 30

[74] Marzuki, 1983, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, Hal.56

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lebih jelasnya,[75] menjelaskan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karaktristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Lebih lanjut menurut, dijelaskan bahwa: "Populasi adalah totalitas yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitas dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan yang jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya." Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa-siswi SMAN 14 Pekanbaru yang berjumlah 72 anak dari dua kelas 7 dan 8.

Menurut Sugiyono, "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Dari pendapat diatas dalam penelitian ini di gunakan sesuai dengan sifat-sifat atau ciri-ciri sesuai dengan kebutuhan peneliti maka sampel yang digunakan sebanyak 8 orang anak siswa-siswi SMAN 14 Pekanbaru yang dipilih berdasarkan dari 72 populasi dan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Tentang purposive sampling. mengatakan bahwa "Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Sedangkan menurut[76]. "Sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu".

Table 1.2
Populasi dan Sample

No	Objek	Populasi	Sample

[75] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Hal. 119-121.

[76] Asrof Safi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jurnal Analisis Surabaya: eLKAF, 2005, hal. 134

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.	Kepala SATLANTAS Resort Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
2	Siswa-siswi SMAN 14 Pekanbaru dari 2 kelas & dan 8	72 Orang	8 Orang

5. Alat dan Pengumpul Data

Yang menjadi kegiatan pengambilan data dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data melalui dialog/percakapan (tanya jawab) dengan beberapa responden yang ditunjuk untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu.[77]

6. Analisis Data dan Metode Pengambilan Menarik Kesimpulan

Setelah semua data didapatkan dan dikumpulkan, tidak cuma hanya bagian data primer maupun data sekunder, selanjutnya data itu dikelola dijadikan pengelompokan sehingga dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya dari dua permasalahan pokok yang diteliti. Data yang di dapatkan dalam hal wawancara maka dapat di sajikan berupa bentuk pembahasan dengan suatu uraian kaliamat, kemudian memberikan penjelasan secara mendalam dari akar permasalahan dan hal itu mengkaitkan nya kepada pendapat beberapa ahli serta peraturan perundangundangan yang saat ini masih berlaku, hasil berupa penelitian orang lain

[77] Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Jurnal Analisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemudian, penulis menarik kesimpulan dengan sebagai cara menggambarkan kesimpulan dari seseuatu yang umum ke yang spesifik[79]

[79] Farhan, 2020, Skripsi Tinjauan Hukum Teradap Izin Tempat Uasaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Temapat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 30

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalulintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang[78] Apapun alasan pembenar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain[79] Adapun dalam "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan".

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

[78] Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 71
[79] Poerwadarmita, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusat, Jakarta, Hal. 556

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur".

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya sesorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 menjelaskan bahwa, "Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993".

Adapun peraturan "Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni: Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat".

Hal di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

a. Jenis-Jenis Pelanggaran

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ribuRp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan peseped.

Lalu, kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis, kendaraa bermotor yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.[80]

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan

[80] Lucky, "Berita Terkini : Keselamatan Jalan" http://rsa.or.id/ini-klasifikasi- pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.[81]

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan

[81] Lucky, "Berita Terkini : Keselamatan Jalan" http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00) [84] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang

sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik bendabenda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain..[84]

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor "22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurugan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. 00 (satu juta rupiah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan ganguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) by atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250. 000,00 (dua ratus lima puluh ibu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertchs sebagimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagiamana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302 yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Setiap orang Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".[82]

Berdasarkan dari peristiwa yang Penulis paparkan maka dari itu pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) menjadi fokus penulis dalam meneliti karya ilmiah Skripsi .

Sangat jelas bahwa pengaturan setiap orang yang mengendarain kendaraan bermotor harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagai diatur dalam "Pasal 77 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni:[83]

1. Seluruh pengemudi kendaraan roda dua dijalan haruskan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai.

[82] Pasal 279, 280, 281, 283, 285, 291, 293, 294, 297, 302, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[83] Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1 terdapat dua jenis, sebagai berikut:
3. SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan pribadi
4. SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan umum
5. SIM (Surat Izin Mengemudi) didapatkan dengan mempunyai keahlian melalui pembelajaran dengan sendiri.
6. SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi angkutan umum didapatkan dengan cara pendidikan serta pelatihan pengemudi angkutan umum.
7. Dalam ayat 4 pendidikan serta pelatihan pengemudi untuk angkutan umum, hanya bagi yang telah memiliki surat izin mengemudi perseorangan".

Anak yang belum memiliki surat izin mengemudi(SIM) dari kepolisian, tidak diizinkan mengendarai sepeda motor. Berdasatrkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1. Dalam pasal ini mengatur bahwa Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi(SIM) sesuai kendaraan yang digunakan[84]. Berdasarkan Undang-UndangNo.22 Tahun 2009 Pasal 81. Menjelaskan syarat usia mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun. Sedangkan untuk mengurus SIM B1 minimal usia yang dipersyaratkan adalah 20 tahun, SIM B2 minimal berusia 21 tahun.[85]

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 281. Pasal ini menjelaskan tentang ancaman bagi yang tidak memiliki SIM. Bahwa, pengemudi yang tidak menunjukkan SIM bisa terjerat pidana kurungan penjara selama maksimal 4 (empat) bulan, atau denda maksimal 1 juta rupiah.[86]

[84] Pasal 77, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[85] Pasal 81, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[86] Pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4). Dikatakan bahwa, Jika dalam berkendara tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, ada ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 12 (dua belas juta rupiah).[87] Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2011 tentang sistem Peradilan Anak terkait hukuman pidana anak dalam kecelakaan lalulintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dijatuhi sanksi pidana $^1/_2$ (setengah) dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yaitu 3 (tiga) tahun[88]. Hal ini semata-mata diberikan dengan tujuan untuk melindungi anak dari akibat buruk pidana penjara.

2. Tugas dan Fungsi Polisi di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya.

"karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus

[87] Pasal 310, ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[88] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sistem Peradilan Anak terkait hukuman pidana anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertindak".[89]

a. Tugas polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :[90]

a. Operatif

1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
2) Mengatur lalu lintas
3) Menegakkan hukum lalu lintas

b. Administratif

1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas

b. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Trafic Law Enforcement)*, yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

[89] Satrio Aji Hadisuwito, 2020, Skripsi Faktor – Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Polres Temanggung, Jurnal Analistik, Universitas Muhammadiah Magelang, Magelang, Hal. 29

[90] http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari 2022, Pukul 13:00)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Trafic Education).*

c. Enjinering lalu lintas (*Police Trafic Enginering).*

d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:[91]

a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.

b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum

c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas

d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaran bermotor

e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.

3. Faktor Penegakan Hukum

Usaha aparat penegak hukum untuk memastikan peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana apabila dibutuhkan dapat melakukan daya paksa untuk menegakkannya, hal ini terlihat dari segi sabjek penegakan hukum. Jadi dari segi subjeknya dapat diartikan sebaagai ketertiban semua subjek hukum dalam setiap kaitan hukum untuk penegakamn hukum. Selanjutnya penegakan hukum objeknya dapat dibedakan dalanm arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berarti penegakam hukum yang didalam nya terdapat nilai keadilan yang

[91] Nanang, Ramla, 1993, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalulintas, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hidup ditengah masyarakat dan nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal. Penegakan hukum dari aspek objkenya dapat diartikan berupa penegakan hukum yang didalamnya terdapat aturan yang tertulis atau formal.[92]

Penegakan hukum merupakan proses untuk tegak dan berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai patokan prilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum kehidupan dalam masyarakat dan bernegara.[93]

Aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang penting sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau perbuatan pemakai jalan yang melanggar ketentuan lalu lintas. UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.[94]

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara. Dalam Kamus Besar Bah asa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap oranng yang melanggar undangundang dan sebagainya)..[95]

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

---

[92] K, Arifin Leonardo Sambas, 2016, Teori-teori Klasik dan Kontemporer, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 131

[93] Sugino, Edi, 2014, Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jurnal Analisi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23

[94] pasal 200 (3) Huruf H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[95] https://kbbi.web.id/polisi, (Diaskses pada 19 Juni 2021, Pukul 20:00)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan lembagapolisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 (1), 2017).[96]

Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:[97]

1) Kepolisian Negara Repulik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamana dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1)

Satuan Lalu lintas kemudian disingkat menjadi Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas[98]

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian

---

[96] Pasal 1, Aya 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[97] Pasal 5, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[98] https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun2010.pdf, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

resort dan kepolisian sektor pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kepala Polisi Daerah.[99]

Satuan Lalulintas sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:[103]

a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi 21 Pasal 1 angka (20)
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya pengguna jalan; dan
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

[99] https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun2010.pdf, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41) [103] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugasnya.

:[100]

a. Urusan pembinaan Operasional (urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatusahaan;
c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
d. Unit Pendidikan Masyarakat dan rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan lalu
f. Unit Kecelakaan (Unitlaka) yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

[100] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara. [101]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)

Perbincangan masalah hukum seakan tiada habisnya apalagi kondisi penegak hukum di Indonesia dianggap terpuruk atau pada titik nadir. Terpuruknya penegakan ini menunjukkan adanya penyimpangan asas equality before the law dan pengingkaran-pengingkaran atas keluhuran fungsi hukum.[102][103]

Secara konsepional, maka inti dari penegkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[104]

Dalam arti luas penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya penegakan hukum dari sudut pandang objeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang dalam hidup ditengah masyarakat dan nilai-

[101] (https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)

[102] Waluyo, Bambang, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. [103]

[104] Soekanto, Soerjono, 2016, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal.5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek objeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.[105]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[106]

4. Peran dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Peran polri sangat penting sebagai penegak hukum pandang dalam UndangUndang No. 22 Tahun 2002 Keplolisian Negara Repulblik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni Memelihara ketertiban dan keamanan mnasyarakat. Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada mansyarakat.[107]

Kewajiban polri lalulintas untuk mengawas, membantu, menjaga agar sistem transportrasi lancar dan tepat atau baik. Peran polisi dalam mengawasi, membatu dan mejaga agar ditaatinya aturan yang berlaku, hal ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakamn hukum ialah suatu upaya untuk menggapai menjadi kenyataan. [108]

---

[105] K, Arifin Leonardo Sambas, 2016, Teori-teori Klasik dan Kontemporer, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 131

[106] Sugino, Edi, 2014, Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jurnal Alaisis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23

[107] Pasal 13, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang tugas dan wewenang polisi

[108] Rahardjo, Sarjipta, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jallan diaturnya tugas dan fungsi Polri terdapat 9 (sembilan) hal, ialah : [109]

1. Menguji damn menerbitkan SIM kendaraan bermotor
2. Melaksanakan masukan dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Menggabungkan, mengawasi, mengelola, dan menyediakan angkutamn.
4. Mengelola sistem lalulintas angkutan jalan
5. Mengatur, menjaga, mengawal patroli lalulintas
6. Menegakan hukum yang merupakan menindak pelanggar dan menangani kecelakaan lalulintas
7. Pengajaran berlalulintas
8. mengatur rekayaasa lalulintas
9. Mengatur kerja lalulintas.

Polri tidak berorientasi pada kewenangan, maka dari itu diciptakannya Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Dalam bidang lalulintas perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi polri, yang berorientasi erat dengan lainnya, baik tentang aspek hukum atau penjagaan kadamaian dan taat masyarakat (Kamtibmas) dan penanggulangan kejahataan secara tepat.

Pada struktur masyarakat polri bertugas dalamn mengegakan dan menjaga, serta memiiliki tanggung jawab inti dalam memelihara ketertiban penduduk baik

[109] Pasal 12, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulinas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam bentuk upaya kejahatan maupun pencegahan kejahatan. Agar masyarakat bisa hidup dan beraktifitas dalam keadaan damai dan sentosa.[110]

Perbincangan masalah hukum seakan tiada habisnya apalagi kondisi penegak hukum di Indonesia dianggap terpuruk atau pada titik nadir. Terpuruknya penegakan ini menunjukkan adanya penyimpangan asas equality before the law dan pengingkaran-pengingkaran atas keluhuran fungsi hukum.[111][112]

Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan undang-undang.[113]

a. Harus ditegakkan dengan “tepat”

b. Harus ditegakkan dengan “tegas"

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hokum tersebut seperti polisi, jaksa, dan pemerintah daerah itu sendiri.[114]

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan

---

[110] Efendi, Bahtiar, 1991, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Analisis, UGM, Yogyakarta Hal. 1

[111] Waluyo, Bambang, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. [112]

[113] Harahap, M. Yahya, 2012, Pebaasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 76

[114] Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Likungan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelancaran lalu lintas..[115]

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berdampak pada sarana dan prasarana pendukung moda transportasi yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berkembang dengan pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yang memadai, keterampilan berkendara dan disiplin berlalu lintas bagi pemakai kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya berakibat pada tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.[116]

Dalam upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu lintas telah dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui media elektronik maupun cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal. Masalah lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat.[117]

Sesuai dengan misi Polantas adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan

[115] http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari 2022, Pukul 13:00)
[116] Kristiano, Suriana Supriatna, 2019, Perkembangan Sarana Prasarana Transportasi Dalam Hubungan dengan tingkat Perekonomian Masyarakat Di Desa Kolag Kecamatan Kuwus Barat, Jurnal Geografi Gea, Jurnal Analisis, Nusa Tenggara Timur, Hal. 138
[117] http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari 2022, Pukul 13:00)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bermotor dan pengemudi di jalan. Pada bagian pengkajian masalah lalu lintas merupakan salah satu upaya membangun kemitraan dan membangun kesadaran berlalu lintas para pengguna lalu lintas diantaranya dengan melakukan berbagai pencegahan kecelakaan lalulintas.[118]

Untuk itu berbagai upaya dalam menekan kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan juga diperlukannya berbagai program yang dapat digunakan sebagai sarana koordinasi kepada instansi terkait lainnya sehingga dapat terciptanya kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban Lalulintas dijalan.[119]

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian di Wilayah kota Pekanbaru antara lain pre-emtif, preventif, dan represif. Ketiganya diuraikan sebagai berikut :[120]

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awawl yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai moral/norma-norma yang baik sehingga normanorma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian yang berada dibagian Satlantas Polres Kota Pekanbaru untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu

[118] http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari 2022, Pukul 13:00)
[119] Ibid
[120] Alam, A.s dan Ilyas, Amir, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hal. 78 - 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lintas yang di lakukan oleh anak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan sosialisasi setiap hari senin disetiap pelaksanaan apel/upacara ke tiap-tiap sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang berada di Kota Pekanbaru sebagai upaya awal pencegahan untuk anak diusia dini.

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini, mereka memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas, bahaya apa yang terjadi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, dan etika dalam berlalu lintas. Selain di lingkungan yang tentunya aparat kepolisian juga melakukan sosialisasi ke lingkungan-lingkungan masyarakat mengenai tertib berlalu lintas. Dengan adanya sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat ini diharapkan agar masyarakat terutamanya anak yang berada di Kota Pekanbaru dapat memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan berjaga pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan, upaya ini dianggap efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para pengguna (dalam hal ini anak) jalan yang tidak memiliki surat-surat untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan beberapa operasi yang diperintahkan oleh atasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mereka untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi seperti patroli rutin yang dilakukan tiap hari pada jam-jam tertentu, operasi secara berkala.

Dari jadwal operasi secara berkala diharapkan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terutama anak, karena dengan penjagaan yang ketat seorang anak tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan bermotor bahkan melakukan suatu pelanggaran lalu lintas.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law emforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pemberian sanksi apabila aparat kepolisian menemukan anak yang membawa sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas, contohnya SIM, tidak mengenakan hlem, maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

Fungsi tilang tersebut adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut.

Upaya pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun dalam hal ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyeluruh dan langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Upaya-upaya ini merupakan proses dan perwujudan Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalulintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dan saling mendukung.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:[121]

a. Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelanggaran hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebakan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. justru itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakarretan tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup Law Enforcement, namun juga peace maintenance, karena

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

[121] Soekanto, Soerjono, 1996, Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Faktor penegak hukum

Yang dimaksud yakni adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Seperti Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan status dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hakhak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban kewajiban tertentu tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

B. Tinjauan Umum Anak

1.Pengertian dan Definisi anak.

a. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[122]

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".[123]

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[124] Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut.[125]

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa "Belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa "dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

[122] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

[123] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

[124] Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

[125] R.Wiyanto, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk memberikan arti dari frasa "Termasuk anak yang masih dalam kandungan" dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya".

d. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa "untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".

Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[126]

e. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara"anak yang berhadapan dengan hukum".

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh "Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

[126] Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu parker pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)[127].

Menurut penulis, frasa "anak yang berhadapan dengan hukum" dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan :

"Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya".

2. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan

[127] Pasal 1 Angka 3,4,5, *Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:[128]

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan unutk menghindari labelisasi.
7. Pemberian jaminan untuk orang tua dan keluarga
8. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan *"anak"* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga\ melakukan tindak pidana". Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:[129]

[128] R.Wiyanto, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 15
[129] Ibid, Hal.8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

2. Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:[130] 1)

Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

2) Hak atas pelayanan.

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

6) Hak untuk memperoleh asuhan. 7) Hak untuk memperoleh bantuan.

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[130] Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:[131]

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
   a. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
   b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
   c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asai manusia yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi: [132]

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

[131] Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[132] Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asai manusia yang dirampas kebebasannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang dilakukan perunahan pada Umdamg-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:[133]

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

[133] Pasal 4 - Pasal 18, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang dilakukan perunahan pada Umdamg-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) diskriminasi;

b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c) penelantaran;

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UndangUndang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kecuali huruf g, dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi:[134]

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

[134] Pasal 22 ayat (1) UndangUndang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keluarga;

j. mendapatkan pembebasan bersyarat;

k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66, yakni meliputi: [135]

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang temuat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam Pasal 17 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dari anak yang dirampas

[135] Pasal 66, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebebasannya, yakni meliputi: [136]

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Selain memperoleh hak-hak diatas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga hak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:[137]

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

[136] Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
[137] Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Secara lebih lanjut, dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk: [138]

a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun

[138] Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :[139] ayat (1) adalah "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana" ayat (2) adalah"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana",

ayat (3) adalah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H. , beliau berpedapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan denbgan hukum atau peradilan.

2. Bentuk Kenakalan Anak

[139] Pasal 1,2,3, Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kenakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency" yang artinya anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela, Romli Atmasasmita merumuskan juvenile delinquency yakni setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[140]

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah Juvenile Delinquency menurut Adler adalah:[141]

a. Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

b. Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;

d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila

[140] Romli Atmasasmita,2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Kota Besar, hlm. 23

[141] Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 13 - 14

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menculik, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

g. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

i. Tindakan-tindakan amoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal sifatnya;

j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadi sertai dengan tindakan-tindakan sadis;

k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

n. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;

o. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;

p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ- organ yang inferior.

3. Tindak Pidana Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, yaitu:[142]

a. Pelanggaran keamanan umum, seperti:
   1) Mabuk di muka umum dan merintangi lalu lintas, menganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
   2) Menyebabkan kebakaran di muka umum.

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
   1) Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengaganggu masyarakat.
   2) Menggelandang.

[142] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Penadah.

4) Pemalsuan.

5) Perusakan informasi di muka umum.

c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:

1) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melangggar kesusilaan di muka umum.

2) Mabuk di muka umum.

4. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, yakni:[143]

1. Jenis Pidana Bagi Anak Nakal

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:[144]

a. Pidana Pokok 1)

pidana peringatan

2) pidana dengan syarat:

a) pembinaan di luar lembaga

[143] Pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[144] Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) pelayanan masyarakat, atau

c) pengawasan.

3) pelatihan kerja

4) pembinaan dalam lembaga, dan 5) penjara.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

3) pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

2. Tindakan Bagi Anak Nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:[145]

1) pengembalian kepada orang tua/Wali

2) penyerahan kepada seseorang

3) perawatan di rumah sakit jiwa

4) perawatan di LPKS

[145] Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

3. Macam-macam Kenakalan Anak

Sri Widowati Wiratmo Soekito yang dikutib oleh Tholib Setiady mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja) yaitu:

1) Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja)
2) Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturanperaturan yang berlaku bagi orang dewasa
3) Pre-deliquency atau pelanggaran terhadap norma educatif
4) Anak-anak yang berada (in need of care and protection) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak (Tholib Setiady, 2010: 179)[146]

Dr. Wagiati Soetodjo, S.H., M.S yang dikutib oleh Tholib Setiady, menyatakan bahwa gejala kenakalan anak (remaja) akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana cirri-ciri khas atau cirri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut, antara lain:[147]

1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan

[146] Prof. Dr. Sofyan S. Wilis, M. Pd. 2010, Remaja Dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya, Alfa Beta Bandung, Bandung, 179

[147] Ibid, Hal. 181-182

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewakan kehidupan luk atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orangtua kurang, maka akan mudah sekali anak muda (remaja) terjerumus dengan melakukan kriminal misalnya mencuri, menodong, dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3) Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4) Corak hidupnya bercorak asocial dan keluar daripada dunia objektif kearah dunia subjektif sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaankegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya.
5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal-hal tersebut, dapat dimengerti dimana fase remaja merupakan fase transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat dari semua pihak, anak gejala kenakalan ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

Lebih tegas lagi dinyatakan oleh Adler yang dikutib oleh Tholib Setiady, yang menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah juvenile delinquency menurutnya adalah:[148]

1) Kebut-kebutan di jalananan mengganggu keamanan lalu lintas yang membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4) Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacammacam kedurjanaan dan tindakan a-susila.
5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas,

[148] Ibid, 180- 181

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjambret, menyerang, merampok, menganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang menganggu sekitarnya.
7) Perkosaan

C. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau,Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminalantar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.[149]

2. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km^2 menjadi lebih

[149] Darmawati, 2008, Dertiminasi Resgistrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, Teroka Riau, Riau, Hal. 61

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kurang 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km^2. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.[150]

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1^0 C hingga 35,6^0 C dan suhu minimum antara 20,2 ^{0} C hingga 23,0 ^{0} C. Kota Pekanbaru terletak antara

101^0 C 14' – 101^0 C 34' Bujur Timur dan 0^0 25'

- 0^0 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km^2 menjadi lebih kurang 446,50 Km^2 terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

[150] Badan Pusat, Statistik,2014, Pekanbaru dalam Angka, Jurnal analisis, Hal.1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.[151]

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km^2, sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km^2.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke

[151] Ibid, Hal. 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api.Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

4. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- qur'an ini, jika sebelumnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementrian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jemaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan..[152]

5. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masingmasing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

[152] Ibid, Hal.5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal

Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota

Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

7. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain: Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.[153]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas oleh anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Membahas tentang kriminologi khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studynya pada proses pembuatan dan bekerjanya undangundang, dapat memberikan sumbangannya ya ng besar dalam bidang

[153] Suwardi, 2008, Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kta Sekota Se-Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Riau, Hal. 273

sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak terdakwa maupun korban kejahatan, disamping untuk perundang undangannya sendiri.[154]

H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat dibagi dalam dua kajian, yaitu Kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu pengetahuan yang membahas masalah masalah kejahatan mengenai bentuk bentuknya, sebab dan akibat akibatnya, (Mendrofa, Maya Etrisna, 2013 p. 18).[155][156]

Kriminologi dalam arti luas ialah semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara agar menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum, yakni meliputi: penyelidikan perseorangan misalnya pembicaraan lisan secara langsung pada penjahat kepada saksi-saksi dan korban, penyelidikan terhadap bekas sidik jari, ilmu racun, ilmu kedokteran kehakiman, dll.[157]

Dalam penelitian Skripsi ini penuis menggunakan teknik Purposive Sampling. Penjelasan tentang Purposive Samling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Sedangkan menurut.[158] "Sampel dilakukan dengan

---

[154] Zulkarnain S, SH., MH, 2016, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, Hal. 55

[155] Mendrofa, Maya Etrisna, 2013, Skripsi Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor :

[156] /Pid.Sus/2012/Pn.Ta), Jurnal Analisis, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, Hal. 18

[157] Zulkarnain S, SH., MH, op. cit. Hal. 49

[158] Asrof Safi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jurnal Analisis Surabaya: eLKAF, 2005, hal. 134

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu". Berikut tabel yang disajikan.

Table 3.1
Populasi dan Sample

No	Objek	Populasi	Sample
1.	Kepala SATLANTAS Resort Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
2	Siswa-siswi SMAN 14 Pekanbaru dari 2 kelas, kelas 10 dan 11	72 Orang	8 Orang

Berdasarkan dari table diatas, maka sampel yang digunakan sebanyak 8 orang anak siswa-siswi SMAN 14 Pekanbaru, dari dua kelas 10 dan 11 yang dipilih berdasarkan dari 72 populasi dan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode purposive sampling, peneliti mendapatkan beberapa beberapa nama yang diwawancara yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan sample siswa-siswi SMAN 14 pekanbaru Pada tanggal 10 April 2022, terkait dengan masalah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kota Pekanbaru. Sebagai berikut:

1. Anak berinisial IAH kelas 11 SMA 14 Pekanbaru Melakukan pelanggaran lalulintas tidak memiliki Surat izin mengemudi, dan tetap mengendarain kendaraan bermotor karena faktor dari kesibukan orangtua yang bekerja,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga harus tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk kesekolah. Dari wawancara diatas dapat simpulkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalulintas oleh anak di karenakan dari faktor keluarga atau orangtua yang sibuk dan bekerja dan mengharuskan anak mengendarain kendaraan bermotor untuk kesekolah.

2. Anak yang berinisial RS dari kelas 11 SMA 14 pekanbaru melakukan pelangaran karena ketidak tahuannya dalam pentingganya memiliki surat izin mengemudi. Dan mengakibatkan dia tetap berkendara kendaraan bermotor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelangaran lalulintas, karena kurangnya pendikan atas pelanggaran lalulintas tersebut.
3. Anak berinisial MR dari kelas 10 SMA 14 Pekanbaru melakukan pelangaran dikarenakan diberi izinnya dari orangtua untung mengendarai kendaraan bermotor kesekolah, dan faktor ini kembali dapat kita liat, darifaktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas karena faktor keluarga dan orangtua, yang membebaskan anak dalam berkendara kendaraan bermotor, dan tidak tau bahayanya berkendara tanpa surat izin mengemudi.
4. Anak berinisial MF dari kelas 11 SMA 14 pekanbaru, mengutip dari anak tersebut yang memberi jawaban terhadap wawancara, dia melakukan pelanggaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi dan tetap mengendara kendaraan bermotor karena malu dengan teman-teman jika tidak memiliki dan tidak mengendaraain kendaraaan bermotor, sehingga bagi dia harus mengendarai kendaraan bermotor agar terlihat baik di mata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

temantemannya. Dari yang terjadi oleh anak tersebut dapat kita lihat bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas adalah faktor pegaulan yang mengharuskan anak tersebut mengendaran kendaraan bermotor.

5. Anak berinisial AF dari kelas 11 SMA 14 Pekanbaru, dari jawaban wawancara anak tersebut juga hampir sama dengan anak berinisial MF, yang sama melakukan pelangaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi dan tetep berkendara kendaraan bermotor karena faktor pergaulan yang mengharuskan dia memiliki dan berkendara kendaaraan bermotor karena malu dan menjadi ikut-ikutan dalam berkendara kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi.
6. Sedangkan anak beinisial HAS dari kelas 10 SMA 14 pekanbaru, dari wawancra dgn anak tersebut, peneliti mendapatkan faktir penyebab yang cukup berbeda dari faktor-faktor lainnya, dikarenakan anak tersebut memiliki tempat tingal yang cukup jauh yaitu di kabupaten Kampar yang cukup jauh dari akses kendaraan umum, yang mengakibatkan anak tersebut harus berkendara kendaraan bermoto untuk kesekolah. Dari wawancara dgn anak berinisial HAS tersebut peneliti mendapatkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas yang cukup berbeda, yaitu kurangnya akses kendaraan umum bagi masyarakat, sehinga mengharuskan untuk berkendara kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti mendapatkan kesamaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersadarkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas terhadap anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran Lalululintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:[159]

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkunga sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelangaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalulintas tidak terjadi. dapat menyimpukan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelangaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhaap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan menfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelangaran karena kurangnya

[159] A Amriani, 2017, Skripsi Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalulintas Oleh Anak Di Wilayah Polres Jeneponto, Jurnal Analisis, UIN Alaudun Makasar, Makasar, Hal. 59 - 61

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengetahuan berlalu lintas..[160]

2. Faktor pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, bak pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah.

Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak

tersebut.[161]

3. Faktor pergaulan atau lingkungan anak

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada

[160] Atmasasmita, Romli, 1992, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, Hal. 50

[161] Budiman, Novita Indriani, 2017, Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalulintas Yang dilakukan Oleh Anak, Jurnal Analisis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Hal. 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.[162]

Dari penelitian purposive sampling yang peneliti lakukan, peneliti dapat menerek kesimpulan bahwa 2 anak melakukan pelanggaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi karena faktor penyebab dari keluarga yang dimana Keluarga merupakan lingkunga sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelangaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalulintas tidak terjadi. Tetapi disini dapat kita lihat bahwa peran keluarga atau orangtua yang malah memberi izin kepada anak untuk

[162] Abdullah, soejono soekanto & Mustofa, 1980, Ssosiologi Hukum dan Msayarakat, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 96

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkendara kendaraan bermotor dikarena kan kesibukan yang dimiliki oleh orangtua yang tidak memikirkan bahayanya berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi.

Dan juga peneliti mendapatkan anak yang melakukan pelanggaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi dan tetap berkendara kendaraan bermotor karna kurangnya pendidikan atau pengetahuan tentang pentingnya peraturan berlalulintas terutama tentang peningnya berkendara dengan memiliki surat izin mengemudi, karena dengan mengetahui tentang peraturan berlalulintas dapat sedikit mengurangi angka pelanggaran lalulintas bagi anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang dapat kita lihat pada tahun 2020 berjumlah 1.665 anak dari data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Satlantas Resort Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pelanggaran Lalulintas Tidak memiliki SIM yang di lakukan oleh anak berdasarkan pendidikan dan usia pada tahun 2020

No.	Strata Pendidikan	Tahun 2020
1	SD	249
2	SLTP	906
3	USIA <17 Tahun	510
4	Jumlah	1665

Sumber : Kepolisian Satlantas Resort Kota Pekanbaru

Dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di SMA 14 pekanbaru, peneliti jugak mendapat faktor penyebeb terjadinya pelanggaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi karena faktor pergaulan yang memnyebabkan anak melakukan pelanggaran lalulitas terutama tidak memiliki surat izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengemudi dan tetap berkendara, karena beberapa anak dari hasil wawancara berkata bahwa malu jika tidak memiliki atau berkendara kendaraan bermotor karena dari kawan-kawan meraka sebagian besar memiliki kendaraan bermotor, tanpa memiliki surat izin mengemudi, dari sini dapat kita lihat pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.[163]

Dan juga dari penelitian yang peneliti lakukan di SMA 14 Pekanbaru, dari hasil wawancara anak, peneliti mendapatkan jawaban yang menarik berupa faktor penyebab pelanggaran lalulintas berupa jauhnya tempat tinggal dan jauhnya aksen kendaraan umum bagi anak tersebut yang mengakibatkan keharusan bagi anak tersebut untuk berkendara kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi untuk sampai kesekolah. dari sini dapat kita ambil bahwa selain peran keluarga, peran pendidikan dan pergaulan, faktor dari pemerintah berupa infrastruktur kendaraan umum juga berperngaruh menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas. Karena kurang meratanya akses kendaraan umum bagi masyarakat terutama anak yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari akses kendaraan umum tersebut.

[163] Ibid, Hal.20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari peneliian yang dilakukan bagi anak yang tidak memiliki surat izin menemudi dapat dikenakan aturan mengenai SIM sebagai salah satu izin yang sah mengemudikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 106 ayat (5) huruf b. Jika pengemudi tidak bisa menunjukkan SIM atau tertinggal maka akan dikenakan sanksi seperti tertuang dalam UU LLAJ 22 tahun 2009 pasal 288 ayat 2, yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.[164]

Namun, sanksi lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tak memiliki SIM seperti diatur dalam pasal 281 pada UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi berupa denda atau kurungan ini sudah tertulis pada Pasal 281 di UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.[165]

Dari Undang-undang LLAJ yang telah dijabarkan diatas dapat kita lihat sangat kerasnya sanksi yang dijatuhkan bangi pengendara yang tidak memiliki surat izin

[164] Pasal 106 Ayat (5) Huruf B, Pasal 288, Ayat 2, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[165] Pasal 281, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengemudi. Tetapi sejauh ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat luas yang mengakibatkan masi banyaknya angka pelanggaran lalulintas yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Berikut table pelanggaran lalulintas tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pelanggaran Lalulintas Tidak memiliki SIM yang di lakukan oleh anak berdasarkan pendidikan dan usia pada tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH	GOLONGAN		
			SD	SLTP	USIA<17 TH
1	JANUARI	151	76	107	54
2	FEBRUARI	364	53	210	101
3	MARET	339	21	236	82
4	APRIL	236	11	172	53
5	MEI	1	-	-	1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6	JUNI	48	8	20	20
7	JULI	95	17	11	67
8	AGUSTUS	74	12	17	45
9	SEPTEMBER	59	-	24	35
10	OKTOBER	56	10	46	14
11	NOVEMBER	78	24	38	16
12	DESEMBER	64	17	25	22
	JUMLAH	1.565	249	906	510

Sumber: Kepolisian Satlantas Resort Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang didapat dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pelanggaran lalulintas pada anak yang tidak memiliki SIM tetap ada, walaupun jumlahnya tidak satabil. Hal ini dibuktikan dengan data yang di dapat dari Kepolisian Resor kota Pekanbaru, dimana jumlah keseluruhan bagi pelanggar lalu lintas terhadap anak pada Tahun 2020 mencapai 1.665, yang mana data tersebut sudah dijumlahkan dengan keseluruhan pelanggaran lalu lintas terhadap anak pada tingkat SD sebanyak (249 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak pada tingkat SLTP sebanyak (906 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak <17 tahun sebanyak (510 pelanggar).

Masih banyak lagi anak yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi yang belum di terlihat oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia bertugas sebagai penegak hukum dalam terciptanya keamanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di dalam negeri demi terjaganya ketentraman dan kedamaian masyarakat, dan taat aturan, menjaga, mengayomi dan melayanan masyarakat, terbentukan asai manusia demi terbentuknya kedamaian masyarakat.

Sangat disayangkan masyarakat di Indonesia kurang menyadari akan pentingnya surat izin mengemudi bagi pengendara lalulintas, di Indonesia ketidak sadaraan masyarakat terhadap surat izin mengemudi terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi, terutama di Kota Pekanbaru sendiri terutama pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermotor sangat tinggi.

Adanya data tersebut terlihat bahwa lemahnya pelaksanaan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari sebagian banyak telah mendapatkan sanksi atas pelanggaran.[166] Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak tidak dapat didiamkan dan dianggap remeh karena anak merupakan generasi penerus bagi bangsa yang harus tumbuh dan berkembang baik maupun secara fisik, mental serta lingkungan sosialnya.

Anak pada usia pendidikan SMP dan SMA merupakan usia yang sangat rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada diri mereka. Ketika anak mengalami peningkatan usia tentu lingkungan mereka dalam bergaul pun akan ikut mengalami perubahan. Dari lingkungan baru inilah anak akan mendapatkan pengaruh dari orang lain maupun lingkungannya, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Berikut data jumlah pelanggaran

[166] Pasal 77, Ayat 1, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lalulintas tidak memiliki SIM yang di lakukan oleh anak berdasarkan pendidikan dan usia pada tahun 2020 di Wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022,[167] Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas oleh anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu, Kurangnya kesadaran pada anak tentang pentingnya pengetahuan atas Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkuan jalan, tidak adanya pengarahan oleh orang tua tentang bahayanya berkendara dijalan raya terhadap anak, dan kurangnya moda trnsportasi umum di Wilayah Kota Pekanbaru yang memasuki jalan-jalan kecil sehingga mengakibatkan akses bagi anak menuju jalan raya terbatas, yang

mengakibatkan anak menggunakan kendaraan bermotor, dan bapak Taufikqurrahman jugak menambahkan dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan anak dengan mudahnya menggunakan kendaraan bermotor tanpa tau bahaya dan faktor buruknya mengendaraain kendaraan bermotor dijalan raya.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada

[167] Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tangal 5 April 2022, Penerapan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran lalulintas oleh Anak yaitu sebagai berikut :[168]

1. Pembiaran terhadap pelanggaran

2. Penindakan yang tidak maksimal,

3. Penindakan maksimal

Seperti yang kita lihat wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. kedua: penindakan yang tidak maksimal. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut.

Ketiga: penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus polisi, dilapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : pelanggar terang-terangan, menyepelekan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 April 2022, Upaya yang dialakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran

Lalu Lintas yag dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :[169]

[168] Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Melakukan sosiolisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah- sekolah
2. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah
4. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas
5. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa- siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang disebutkan termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.[170]

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan

---

[169] Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022

[170] Purnomo, Bambang, 2006, Pelaksanaan Pidana Dengan Pemasyarakatan, Rajawali Pers, Yogyakarta, Hal. 103

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasnyarakatan.[171]

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.[172]

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Jeneponto ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

---

[171] Mahkamah Agung RI, https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, (Diakses Pada 30 Juni 2022).
[172] Mahkamah Agung RI, https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak (Diakses Pada 30 Juni 2022). [174] Atmasasmita, Romli, 1994, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, Hal. 66

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu :[174]

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mempertbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Wilauah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan cara preventif masih saja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalulintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelangaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat prnyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi di sekolahsekolah
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bagaimana bentuk uapaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permaalahan pelanggaran Lalulintas yang dilakukan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut, sehingga sempel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehinga untuk pengambilan sempel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada merupakan pengertian dari sempel[173] Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 1.565 anak dan yang tidak memiliki SIM sebanyak 344 pelangar yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat 1 UULLAJ No 22 Tahun 2009.

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emtif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada

[173] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Hal. 119-121.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanggal 5 april 2022, Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur umtuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu ssyarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukaan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapataan terjaring melakukan pelanggaran lalu

lintas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dan hasil wawancara penulis terhadap sample siswa-siswi SMAN 14 pekanbaru, terkait dengan masalah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kota Pekanbaru dan dengan bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas oleh anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru penulis menarek kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Faktor Keluarga, Faktor Pendidika, Faktor pergaulan atau lingkungan. Dan beberapa seperti Kurangnya kesadaran pada anak tentang pentingnya pengetahuan atas Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang

lalulintas dan angkuan jalan, tidak adanya pengarahan oleh orang tua tentang bahayanya berkendara dijalan raya terhadap anak, dan kurangnya moda trnsportasi umum di Wilayah Kota Pekanbaru yang memasuki jalan-jalan kecil sehingga mengakibatkan akses bagi anak menuju jalan raya terbatas, yang mengakibatkan anak menggunakan kendaraan bermotor.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak memiliki SIM yang dilakukan oleh kepolisian lalulintas Kota Pekanbaru adalah pertama: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas, kedua: penindakan yang tidak maksimal, Ketiga: penindakan yang maksimal. juga Melakukan sosiolisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah, Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah, Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas, Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa- siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagi hal dibawah ini :

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang mebawa sepeda motor ke sekolah, Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalulintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpatisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak, Pihak pemerintah jugak berperan unuk penambahan Moda transfortas umum pada jalan- jalan Kecil yang menuju jalan Raya, Agar anak tidak jauh untuk mencapai jalan Raya, jarak yang cukup jauh itu yang juga menjadi penyebab anak menggunakan kendaraan bermotor, Anak hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor anak lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah, soejono soekanto & Mustofa, *Sosiologi Hukum dan Msayarakat*. Rajawali. Jakarta, Vol. 96, Hal. 20, 1980

Adang, Yesmil Anwar, *kriminologi*, PT. Reflika Aditama, Bandung Hal.5, 2013

Alam, A.s dan Ilyas, Amir, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hal.78-80, 2010

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 30, 2006

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Bandung, Hal. 25, 1992

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 40, 1989

Darmawan, Purniati dan Moh Kemal, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87, 1994

Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, Hal. 157, 1983

Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH., *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, Hal. 2, 2020

Ernawati Waridah, S.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Bmedia, Jakarta, 17, 2017

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Likungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 48, 2005

Harahap, M. Yahya, *Pebaasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 76, 2012

Ilyas, A.S Alam dan Amir, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta*. PT RajaGrafindo Persada, Hal. 6, 2011

Khadir, Abdul, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 46, 2001

Kusuma, Mulyana W., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 51, 1986

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 109 - 114, 2016

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 33-34

Moeljatno, 1998, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 46

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 71, 2008

Nanang, Ramla, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalulintas*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 26, 1993

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 71, 2011

Poerwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusat, Jakarta, Hal. 556, 1997

Prof. Dr. Sofyan S. Wilis, M. Pd., *Remaja Dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya*, Alfa Beta Bandung, Bandung, 179, 2010

Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Dengan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Yogyakarta, Hal. 103, 2006

RWiyanto, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 12, 2016

Rahardjo, Sarjipta, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 40, 1993

Raharjo, Stjipto, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan sosial*, Genta Publishing, Jakarta. Hal. 8, 2008

Samsi, Siti Chomarijah Lita, *Integritas Hakim*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hal. 10, 2009

Soekanto, Soerjono, *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 8, 1996

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 45, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hal. 119-121. 2017

Suwardi, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kta Sekota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Riau, Hal. 273, 2008

Usman, Sunyoto, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, Hal. 3, 2006

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13 - 14, 2006

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 262, 2016

Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Hal.11, 2011

Zulkarnain S, SH., MH, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, Vol. 55, 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Artikel Dan Jurnal

A Amriani, *Skripsi Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalulintas Oleh Anak Di Wilayah Polres Jeneponto*, Jurnal Analisis, UIN Alaudun Makasar, Makasar, Hal. 59 – 61, 2017

Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Pisikologi Criminal*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, Medan, 1994

Asrof Safi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jurnal Analisis Surabaya: eLKAF, hal. 134, 2005

Badan Pusat, Statistik,2014, Pekanbaru dalam Angka, Jurnal analisis, Hal.1

Budiman, Novita Indriani, *Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalulintas*
Yang dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar Hal. 49, 2017

Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Samarinda, Hal. 330, 2018

Efendi, Bahtiar, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Analisis, UGM, Yogyakarta, Hal. 31, 1981

Farhan, *Skripsi Tinjauan Hukum Teradap Izin Tempat Uasaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Temapat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 30, 2020

Kristiano, Suriana Supriatna, *Perkembangan Sarana Prasarana Transportasi Dalam Hubungan dengan tingkat Perekonomian Masyarakat Di Desa Kolag Kecamatan Kuwus Barat*, Jurnal Geografi Gea, Jurnal Analisis, Nusa Tenggara Timur, Hal. 138, 2019

Lase Mardivon, Kepolisian dalam Mengendalikan Demontrasi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, Jurnal Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 3 2015

Mendrofa, Maya Etrisna, *Skripsi Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid.Sus/2012/Pn.Ta)*, Jurnal Analisis, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, Hal. 18, 2013

R. Muklis, *Skripsi Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Fakutus Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hal. 222, 2011

Satrio Aji Hadisuwito, Skripsi Faktor–Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Polres Temanggung, Jurnal Analistik, Universitas Muhammadiah Magelang, Magelang, Hal. 29, 2020

Sudiro, Rahtami Susanti, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pada Kecelakaan lalulintas yang Menyebabkan Matinya Orang*, LLPM- Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Jurnal Analisis, Hal. 184, 2020

Sugino, Edi, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Jurnal Analisi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23, 2014 Sugino, Edi, *Skripsi*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jurnal Alaisis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23, 2014
Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Jurnal Analisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hakhak anak atas kesejahteraan
UndangUndang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang tugas dan wewenang polisi
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak

4. Website

https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41
http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari 2022, Pukul 13:00)
https://kbbi.web.id/polisi, (Diaskses pada 19 Juni 2021, Pukul 20:00)
https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun-2010.pdf, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)
Lucky, "Berita Terkini: Keselamatan Jalan" http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaranlalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00)
Mahkamah Agung RI, https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilastentang-sistem-peradilan-pidana-anak, (Diakses Pada 30 Juni 2022).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen Hasil Penelitian

Dokumentasi Penelitian Wawancara dengan Anak